

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SIDOMULYO OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Hinfa Mosshananza¹, Fajar Kurniadi²

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung¹

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung²

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung³

hinfamosshananza@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that experiences floods almost every season. At the beginning of the year, precisely in January 2020, rainfall in several areas in South Lampung Regency increased, one of which was in Sidomulyo District, South Lampung Regency. The role of the South Lampung Regency Government, which in this case is carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) when disaster management is very responsive and crucial. This study aims to determine the implementation of flood disaster management policies by the South Lampung Regency Government and the factors that hinder flood management. This research method uses a qualitative descriptive approach. The results of research in the implementation of flood disaster management policies by the South Lampung Regency Government in Sidomulyo District based on aspects of communication, disposition and organizational structure have been carried out properly, while based on resource aspects have not been carried out properly. The factors that hinder flood management such as poor communication network facilities, lack of funding aspects, slow handling of health services and evacuations and lack of quality and quantity of Human Resources (HR) in supporting disaster management.

Keywords: *Implementation, Policy, Flood Disaster*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami bencana banjir hampir setiap musimnya. Pada awal tahun tepatnya bulan Januari 2020 curah hujan di beberapa daerah di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, salah satunya berada di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat penanggulangan bencana sangat tanggap dan krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan bencana banjir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Sidomulyo berdasarkan aspek komunikasi, disposisi dan struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik, sedangkan berdasarkan aspek sumber daya belum terlaksana dengan baik. Adapun Faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan banjir seperti fasilitas jaringan komunikasi yang buruk, kurangnya aspek pendanaan, lambatnya penanganan pelayanan kesehatan dan evakuasi serta kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung penanggulangan bencana.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bencana Banjir

PENDAHULUAN

Bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang selalu terjadi di Negara Indonesia. Adapun Penyebab banjir yang terjadi disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis dan alur sungai. Dalam Peristiwa alam ini yang dinamis serta curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan permukaan air meluap dan tumpah sehingga melewati bibir sungai. Selain itu masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan banjir yaitu pendangkalan sungai serta aktivitas manusia yang dinamis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa telah diatur tentang pelaksanaan penanggulangan bencana serta organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah tersebut yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pencegahan bencana dalam skala nasional dan daerah.

Pada awal tahun tepatnya bulan Januari 2020 curah hujan di beberapa daerah di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan. Seperti yang disampaikan oleh Camat Sidomulyo Bapak Rendy Eko Supriyanto, S.STP kepada Bupati Lampung Selatan melalui surat Nomor: 360/001/VII.04/2020 pada tanggal 2 Januari 2020 mengenai kejadian banjir. Berdasarkan laporan Camat Sidomulyo, bahwa musibah banjir disebabkan hujan lebat yang mengakibatkan air sungai meluap dan merendam pemukiman penduduk di Dusun Sidosari dan Kraja Desa Sidomulyo sebanyak 30 rumah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, ada peran penting Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan untuk menanggulangi permasalahan banjir yang ada di Kecamatan Sidumulyo. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sidomulyo Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.”**

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam Jurnal Triyono, T., Rosidah, R., & Mosshananza, H. (2022), Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dapat ditentukan dari proses dan pencapaian tujuan (*output*) hal tersebut dapat dilihat dari hasil akhirnya tercapai atau tidak.

Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008: 198) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemerintah menurut Finer (Kuper, 2000: 418) menegaskan empat pengertian, yakni pertama pemerintah menegaskan proses pemerintahan/metode pemerintahan, dimana kewenangan pengoperasian dipegang oleh orang yang mempunyai kewenangan yang sah. Kedua, pemerintah menegaskan pada tempat proses pemerintahan berlangsung. Ketiga, pemerintah menegaskan secara langsung orang-orang yang dapat memegang jabatan sebagai pelaksana kewenangan. Keempat, pemerintah menegaskan pada segi bentuk, cara atau sistem dalam masyarakat, seperti susunan struktur dan pengelola instansi, serta kaitannya antara orang yang memerintah dan orang yang diperintah (Labolo, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Di dalam pelaksanaannya BPBD berada dibawah

dan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Menurut metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa analisis/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Sidomulyo. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang berjalan dengan baik di antara pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil peneliti dalam aspek komunikasi, bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh BPBD berkoordinasi dengan Dinas terkait, pihak Kecamatan dan Desa dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sidomulyo serta telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir.

Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Sidumulyo yang sudah disusun dalam program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan secara berkelanjutan yang diharapkan masyarakat dapat mengetahui potensi bencana banjir serta bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan apabila kejadian bencana tersebut benar-benar terjadi, dengan harapan masyarakat dapat mampu bertindak dengan cermat dan mempunyai cara untuk penyelamatan jika terjadi bencana banjir, serta masyarakat diberikan pemahaman untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir tersebut.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan pada aspek komunikasi adalah lebih kepada karena faktor sinyal *handphone* yang kurang baik terlebih pada daerah yang belum terjangkau secara luas oleh fasilitas jaringan komunikasi sehingga laporan tidak langsung diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh petugas dari BPBD Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu kurangnya respon masyarakat terhadap peringatan bencana sehingga membuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana kurang maksimal.

Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek sumber daya masih belum optimal, bahwa masing kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di pos-pos daerah yang rawan bencana. Dalam keadaan darurat BPBD dibantu oleh beberapa instansi terkait guna melakukan langkah-langkah penanganan bencana banjir antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Sosial serta unsur lainnya yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana banjir. Dalam hal dukungan finansial untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir, BPBD Kabupaten Lampung Selatan melakukan inventarisasi terhadap kerusakan, jika masyarakat yang terdampak lebih besar maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Disisi lain pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan faktor sumber daya masih belum optimal, hal ini dilihat dari aspek pendanaan untuk membuat sebuah Desa Tangguh Bencana membutuhkan biaya yang sangat besar, serta kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur dan bagi masyarakat di Desa Tangguh Bencana juga terbatas.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek disposisi sudah dilakukan dengan baik, jika ada laporan terkait banjir maka Tim TRC yang akan turun pertama terlebih dahulu untuk memantau dan melaporkan ke BPBD untuk menyiapkan Tim Kedua yaitu Tim Logistik serta Tim pemasangan Tenda pengungsi jika kondisi di lokasi warga harus di evakuasi ke tempat yang lebih aman. BPBD selalu berkoordinasi dengan Kecamatan dan pihak Desa untuk

membahas hal-hal yang dibutuhkan dan mencari titik lokasi aman untuk tempat evakuasi warga. Hambatan dalam aspek disposisi seperti yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu bahwa koordinasi yang dilakukan BPBD dengan Kecamatan dan Desa dalam merespon untuk menangani dampak bencana belum efektif. Hal ini seperti lambatnya penanganan pelayanan kesehatan serta proses evakuasi warga yang terdampak banjir.

Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek struktur organisasi sudah dilakukan dengan baik dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait dengan berita kejadian bencana dengan adanya posko siaga bencana dengan personil yang setiap saat dapat dihubungi sudah dilakukan dengan baik, koordinasi dengan kecamatan dan desa berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dilihat dari indikator struktur organisasi adalah kurangnya komitmen dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas serta peningkatan jumlah SDM guna mendukung penanggulangan bencana banjir.

KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan implementasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Sidomulyo berdasarkan aspek komunikasi bahwa sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan aspek sumber daya bahwa daya masih belum optimal, yaitu masing kekurangan SDM terutama di pos-pos daerah yang rawan bencana, untuk aspek disposisi sudah dilakukan dengan baik, BPBD selalu berkoordinasi dengan Kecamatan dan pihak Desa untuk membahas hal-hal yang dibutuhkan dan mencari titik lokasi aman untuk tempat evakuasi warga, dan berdasarkan aspek struktur organisasi sudah dilakukan dengan baik dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait dengan berita kejadian bencana.

Faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan banjir seperti fasilitas jaringan komunikasi yang buruk, kurangnya aspek pendanaan, lambatnya penanganan pelayanan kesehatan dan evakuasi serta kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Triyono, T., Rosidah, R., & Mosshananza, H. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KECAKAPAN KERJA (PKK) DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “BUGENVIL” BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, 2(1), 30-38.

Pustaka yang Berupa Buku:

Agustino. Leo, 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy. J. (2012) Metode Penelitian Kualitatif., Remaja Rosdakarya. Bandung

Kuper, Adams dan Jessica Kuper. 2000. Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.